

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan selama satu periode. Pemerintah saat ini dituntut untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Rahayu *et al.*, 2020). Oleh karena itu, pemerintah khususnya pada tingkat daerah harus bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Hariyani dan Alang, 2019).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan catatan terkait data keuangan selama satu periode yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh penggunanya. Selain itu, LKPD merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Output yang dihasilkan dari LKPD berbentuk informasi akuntansi dimana informasi akuntansi yang disediakan pada sebuah laporan keuangan memiliki tujuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja manajemen. (Pratama, 2017).

Perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPD setiap tahunnya menunjukkan kualitas dari suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dilansir dari *website* BPK tahun 2023, Anggota VI BPK Pius Lustrilanang menyampaikan bahwa adanya perkembangan dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di
Indonesia

OPINI	TAHUN		
	2020	2021	2022
Wajar tanpa Pengecualian	485	486	500
Wajar dengan Pengecualian	50	49	38
Tidak Menyatakan Pendapat	6	4	3

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat adanya peningkatan opini yang di diraih oleh LKPD di Indonesia selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa kualitas LKPD sudah semakin baik. Akan tetapi, tidak jarang masih ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penyajian laporan keuangan meskipun telah ditetapkan standar akuntansi sebagai pedoman. BPK mengungkapkan bahwa masih banyak kesalahan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan. BPK mengungkapkan terdapat 6.965 temuan yang memuat 11.910 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan

permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sejumlah 5.366 dari 11.910 merupakan masalah terkait SPI dan sisanya sejumlah 6.544 merupakan permasalahan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun (BPK RI, 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang mendapat opini WTP selama 11 tahun berturut-turut. Hal ini ditandai dengan pernyataan yang dilansir dari *website* Kabupaten Bantul, Kepala BPK Perwakilan DIY, Widhi Widayat menyatakan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memperoleh opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut yang menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah menunjukkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta menunjukkan penerapan SAKD sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akan tetapi, dilansir dari *website* Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022, 35 pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diperiksa Kejaksaan Negeri Bantul terkait dugaan korupsi dengan modus pembuatan nota fiktif dalam pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan Stadion Sultan Agung dimana fenomena ini merupakan salah satu bukti bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan sistem pengendalian yang lemah.

Berdasarkan fenomena tersebut, laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul walaupun sudah dapat dikatakan

berkualitas tetapi masih ditemukan permasalahan pertanggung jawaban terkait penyajian laporan keuangan yang kurang baik dimana hal tersebut dapat mengakibatkan rendahnya mutu dari suatu laporan keuangan (Purba dan Purba, 2023). Laporan keuangan akan kehilangan nilai dan relevansinya dalam mengambil keputusan yang efektif jika masih terjadi penyimpangan.

Pada kita suci al-quran seruan terkait catatan informasi akuntansi pada laporan keuangan terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hendaknya semua transaksi yang dilakukan harus dicatat dengan benar. Laporan keuangan merupakan wujud dari semua transaksi yang dicatat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah agar informasi akuntansi yang dikandungnya berguna dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja bisnis (Purnama, 2020). Oleh karena itu, informasi akuntansi tersebut harus

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kebermanfaatan (*usefulness*) dari laporan keuangan merupakan suatu karakteristik yang berkaitan dengan pengguna, keputusan dan keyakinan pengguna terhadap suatu informasi akuntansi (Fatmawati dan Setiawan, 2018). Suatu informasi akuntansi dikatakan bermanfaat jika laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dimana laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur karakteristik kualitatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam rerangka konseptual akuntansi pemerintahan yaitu: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Laporan keuangan akan menjadi bermanfaat jika pengguna informasi akuntansi memahami dan menggunakannya (Fatmawati dan Setiawan, 2018). Laporan keuangan yang bermanfaat dapat mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Semakin baik informasi akuntansi yang tersedia pada laporan keuangan, semakin sering informasi akuntansi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan (Khusaini *et al.*, 2022).

Penelitian terkait *usefulness* laporan keuangan sudah pernah dilakukan seperti pada penelitian Monteiro *et al.* (2021) menyatakan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas berdampak pada *usefulness* informasi akuntansi.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Boolaky (2004) menyatakan bahwa kegunaan informasi keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Tetapi, hasil penelitian Khusaini *et al.* (2022) menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kebergunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.

Salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat yaitu keterpahaman. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang mudah dipahami dan terorganisir dengan baik (Setyaningrum *et al.*, 2020). Pada penelitian Helden dan Reichard (2019) disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penggunaan laporan keuangan adalah *interface* dimana *interface* menjelaskan sejauh mana pengguna berinteraksi dengan informasi akuntansi yang disediakan. Tidak semua pengguna informasi akuntansi dapat memahami informasi dari sebuah laporan keuangan karena pada sektor publik kelompok pengguna tersebut berasal dari latar belakang dan memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda (Ouda, 2017)

Beberapa penelitian terdahulu terkait *interface* sudah pernah dilakukan seperti pada penelitian Cohen *et al.* (2022) menunjukkan bahwa tampilan grafis dan visual dapat meningkatkan *usefulness* suatu laporan keuangan. Selain itu, penelitian Langella *et al.* (2021) juga menjelaskan bahwa tata letak, visualisasi

atau representasi grafis pada laporan keuangan dapat meningkatkan *usefulness* laporan keuangan. Namun, hasil penelitian Langella *et al.* (2021) yang lain menyatakan bahwa representasi grafis dan visual tidak berpengaruh pada tingkat pemahaman penggunanya.

Kegunaan atau *usefulness* pelaporan keuangan bagi proses pengambilan keputusan pengguna bergantung pada faktor-faktor internal dan eksternal dari suatu organisasi (Setyaningrum *et al.*, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas tidak menjamin bahwa informasi akuntansi yang disediakan digunakan untuk mengambil keputusan. Beberapa literatur menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi adalah adanya tekanan yang dialami oleh penggunanya. Tekanan dapat berasal dari tekanan internal atau pun eksternal. Tekanan internal merupakan tekanan yang berasal dari dalam organisasi sedangkan tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar organisasi. Tekanan berasal dari banyak faktor misalnya tekanan dari atasan, auditor internal (BPKP), auditor eksternal (BPK), Inspektorat, dan teman sejawat (Agriyanto, 2018).

Salah satu upaya yang masih dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penyempurnaan sistem informasi akuntansi yang digunakan. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di suatu instansi pemerintah (Hartono dan Ramdany, 2020). Sistem informasi akuntansi pada pemerintah

daerah disebut Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan seperangkat subsistem dimana setiap subsistem digunakan untuk mengumpulkan serta mencatat data keuangan seperti prosedur, tahapan, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti (Utami *et al.*, 2020). Dengan adanya SAKD dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir kesalahan pencatatan atau perhitungan akuntansi sehingga mampu menyediakan laporan keuangan yang berkualitas (Defitri, 2018).

Kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan pemerintah daerah berbeda karena penggunaan SAKD yang beragam. Hal tersebut dapat berdampak pada keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan pemerintah daerah. Berdasarkan data kementerian keuangan yang dilansir dari *website* Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagian besar pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau sekitar 68%, 17% menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), 2% menggunakan *E-finance*, 5% pemerintah daerah menggunakan sistem informasi anggaran dan keuangan daerah, 1% pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL), dan 7% menggunakan sistem lainnya. (Dirjen Perbendaharaan, 2023).

Penelitian terkait SAKD sudah pernah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Kusuma *et al.*, 2016); (Rahman dan Permatasari,

2021); (Monteiro *et al.*, (2021). Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dapat meminimalisir kesalahan pencatatan serta menjadi media untuk membantu pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini mengkompilasi penelitian Helden dan Reichard (2019) dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan factor-faktor yang dapat meningkatkan penggunaan dari suatu informasi akuntansi dengan metode literatur review. Sementara penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey kuesioner. Selain itu, penelitian ini menggunakan variable *usefulness* laporan keuangan sebagai variable mediasi dan menggunakan variabel *interface* dikarenakan masih minimnya penelitian yang menggunakan variable *interface* terutama di Indonesia. Variabel *interface* dalam hal ini menguji apakah variabel tersebut dapat mempengaruhi *usefulness* dari laporan keuangan dan *intention to use* laporan keuangan. Penelitian ini juga menambahkan variabel SAKD dan tekanan karena dianggap mempengaruhi *usefulness* laporan keuangan. penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut di dasarkan beberapa studi yang menunjukkan bahwa *usefulness* informasi akuntansi pemerintah di Indonesia masih rendah dalam hal pengambilan keputusan (Khusaini *et al.*, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait *usefulness* laporan keuangan. Selain itu, beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah sudah bermanfaat dan digunakan dalam pengambilan keputusan karena banyak dari pemerintah daerah di Indonesia yang mendapat opini WTP yang menandakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah baik tetapi masih ditemukan kasus seperti kecurangan pada laporan keuangan. Penelitian ini difokuskan pada kelompok OPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam mengenai pengaruh dari *interface*, SAKD, terhadap *usefulness* laporan keuangan serta pengaruh tekanan terhadap *intention to use* laporan keuangan. Kontribusi pada penelitian ini yaitu untuk menambah literatur atau referensi terkait dengan *interface*, SAKD, dan tekanan terhadap *usefulness* laporan keuangan serta *intention to use* laporan keuangan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DETERMINAN *USEFULNESS* LAPORAN KEUANGAN DAN PENGARUH TEKANAN TERHADAP *INTENTION TO USE* LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BANTUL)”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *interface* berpengaruh positif signifikan terhadap *usefulness* dalam laporan keuangan?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *usefulness* dalam laporan keuangan?
3. Apakah tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap *intention to use* laporan keuangan?
4. Apakah *usefulness* laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *intention to use* laporan keuangan?
5. Apakah *interface* berpengaruh positif signifikan terhadap *intention to use* laporan keuangan melalui *usefulness* laporan keuangan?
6. Apakah system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *intention to use* laporan keuangan melalui *usefulness* laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *interface* terhadap *usefulness* laporan keuangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap *usefulness* laporan keuangan
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan terhadap *intention to use* laporan keuangan
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *usefulness* laporan keuangan terhadap *intention to use* laporan keuangan
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *interface* terhadap *intention to use* laporan keuangan melalui *usefulness* laporan keuangan
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh system akuntansi keuangan daerah terhadap *intention to use* laporan keuangan melalui *usefulness* laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur dan juga menambah studi pustaka atau referensi terkait dengan *interface*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan tekanan terhadap *usefulness* laporan keuangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan *usefulness* laporan keuangan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan internal untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul.